

## Kebijakan – Kebijakan Pada Tingkat Makro Untuk Mengatasi Kemiskinan

Feriadi, Jasmine Damayanti, Muhammad Yasin

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Alamat:** Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

Korespondensi Penulis : [yasin@untag-sby.ac.id](mailto:yasin@untag-sby.ac.id)

**Abstract.** Poverty is a complex and multidimensional problem that requires a comprehensive approach to overcoming it. Policies at the macro level have an important role in reducing poverty through various economic, social and structural interventions. This research examines various macroeconomic policies that have been implemented to overcome poverty, including fiscal, monetary, trade policies and structural reforms. Analysis shows that effective policies must include increasing access to education and health, creating jobs, and strengthening social safety nets. In addition, the importance of coordination between national and regional policies is also emphasized to ensure optimal implementation and achievement of poverty alleviation targets. By understanding the impact and effectiveness of these policies, it is hoped that it can provide better recommendations for policy makers in designing appropriate strategies to reduce poverty in the future.

**Keywords:** Poverty, Macroeconomic Policy, Fiscal Policy

**Abstrak.** Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk penanggulangannya. Kebijakan-kebijakan pada tingkat makro memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan melalui berbagai intervensi ekonomi, sosial, dan struktural. Penelitian ini mengkaji berbagai kebijakan makroekonomi yang telah diterapkan untuk mengatasi kemiskinan, termasuk kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, serta reformasi struktural. Analisis menunjukkan bahwa kebijakan yang efektif harus mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan jaring pengaman sosial. Selain itu, pentingnya koordinasi antara kebijakan nasional dan daerah juga ditekankan untuk memastikan implementasi yang optimal dan pencapaian target pengentasan kemiskinan. Dengan memahami dampak dan efektivitas kebijakan-kebijakan ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang tepat untuk mengurangi kemiskinan di masa depan.

**Kata Kunci:** Kemiskinan, Kebijakan Makroekonomi, Kebijakan Fiskal

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang tidak hanya mencakup permasalahan ekonomi, namun juga mencakup permasalahan sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap kemiskinan tidak dapat hanya didasarkan pada kebijakan

ekonomi saja, namun memerlukan serangkaian tindakan komprehensif yang terkoordinasi dengan baik. Memang benar, hal ini merupakan dasar pemikiran yang mendasari strategi pengentasan kemiskinan yang komprehensif. Jadi mengapa fokus pada makroekonomi, karena pertumbuhan ekonomi merupakan satu-satunya faktor terpenting yang mempengaruhi kemiskinan, dan stabilitas makroekonomi sangat penting untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, stabilitas makroekonomi harus menjadi komponen kunci dari setiap strategi pengentasan kemiskinan. Namun stabilitas makroekonomi saja tidak menjamin tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam kebanyakan kasus, tingkat pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan juga bergantung pada langkah-langkah struktural utama, seperti reformasi peraturan, privatisasi, reformasi pelayanan sipil, perbaikan tata kelola, liberalisasi perdagangan, dan reformasi sektor perbankan, yang sebagian besar dibahas panjang lebar dalam Strategi Pengentasan Kemiskinan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana kaitan antara kebijakan makro ekonomi dengan pengentasan kemiskinan?
2. Bagaimana ketidaksatbilan mako ekonomi terhadap masyarakat miskin?
3. Bagaimana stabilitas makro ekonomi penting terhadap pertumbuhan?

## **C. TUJUAN**

1. Untuk mengetahui kaitan antara makro ekonomi dengan pengentasa kemiskinan.
2. Untuk mengetahui kestabilan makro ekonomi terhadap masyarakat miskin.
3. Untuk mengetahui stabilitas makro ekonomi penting terhadap pertumbuhan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. KAITAN ANTARA KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI DENGAN PENGENTASAN KEMISKINAN**

Pertumbuhan ekonomi merupakan *satu-satunya faktor terpenting* yang mempengaruhi kemiskinan. Sejumlah penelitian statistik telah menemukan hubungan yang kuat antara pendapatan per kapita nasional dan indikator kemiskinan nasional, dengan menggunakan ukuran kemiskinan baik pendapatan maupun non-pendapatan. Sebuah studi baru-baru ini yang dilakukan terhadap 80 negara selama empat dekade menemukan bahwa, rata-rata, pendapatan

seperlima penduduk terbawah meningkat sebanding dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan sebagaimana ditentukan oleh PDB per kapita (Dolar dan Kraay, 2000). Selain itu, studi ini menemukan bahwa dampak pertumbuhan terhadap pendapatan masyarakat miskin rata-rata tidak berbeda di negara-negara miskin dibandingkan di negara-negara kaya, bahwa hubungan kemiskinan-pertumbuhan tidak berubah dalam beberapa tahun terakhir, dan bahwa pertumbuhan yang dipicu oleh kebijakan sama baik bagi masyarakat miskin maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Studi lain yang mengamati 143 episode pertumbuhan juga menemukan bahwa “efek pertumbuhan” mendominasi, dan “efek distribusi” hanya berperan penting dalam sebagian kecil kasus (White dan Anderson, akan datang).

Namun studi-studi ini membangun hubungan, bukan sebab-akibat. Faktanya, hubungan sebab akibat bisa saja mengarah ke arah lain. Dalam kasus seperti ini, pengentasan kemiskinan sebenarnya diperlukan untuk menerapkan kebijakan makroekonomi yang stabil atau untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Studi menunjukkan bahwa akumulasi modal oleh sektor swasta mendorong pertumbuhan. Oleh karena itu, tujuan utama strategi pengentasan kemiskinan suatu negara haruslah menciptakan kondisi yang memfasilitasi investasi sektor swasta. Tidak ada solusi ajaib yang dapat menjamin peningkatan tingkat investasi sektor swasta. Sebaliknya, selain serangkaian kebijakan makroekonomi yang berkelanjutan dan stabil, agenda kebijakan pengentasan kemiskinan suatu negara harus, dalam banyak kasus, mencakup berbagai bidang kebijakan, termasuk privatisasi, liberalisasi perdagangan, reformasi sektor perbankan dan keuangan, pasar tenaga kerja, dan reformasi sektor keuangan, lingkungan peraturan, dan sistem peradilan. Agendanya tentu saja mencakup peningkatan dan efisiensi investasi publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan sektor layanan sosial prioritas lainnya.

## **B. KESTABILAN MAKRO EKONOMI TERHADAP MASYARAKAT MISKIN.**

Selain tingkat pertumbuhan yang rendah (dan kadang-kadang bahkan negatif), aspek lain dari ketidakstabilan makroekonomi juga dapat memberikan beban berat pada masyarakat miskin. Inflasi, misalnya, merupakan pajak yang regresif dan sewenang-wenang, yang bebannya biasanya ditanggung secara tidak proporsional oleh mereka yang berada dalam kelompok berpendapatan rendah. Alasannya ada dua. Pertama, masyarakat miskin cenderung memegang sebagian besar aset keuangan mereka dalam bentuk uang tunai dibandingkan aset berbunga. Kedua, mereka umumnya kurang mampu melindungi nilai riil pendapatan dan aset mereka dari inflasi dibandingkan kelompok kaya. Akibatnya, lonjakan harga umumnya lebih banyak mengikis upah riil dan aset masyarakat miskin dibandingkan masyarakat non-

miskin. Selain itu, di luar ambang batas tertentu, inflasi juga membatasi pertumbuhan output, dan dampaknya akan berdampak bahkan pada kelompok masyarakat miskin yang jarang menggunakan uang untuk transaksi ekonomi.

Selain itu, rendahnya pertumbuhan output yang biasanya dikaitkan dengan ketidakstabilan dapat berdampak jangka panjang terhadap kemiskinan (fenomena yang dikenal sebagai “histeresis”). Fenomena ini biasanya terjadi melalui guncangan terhadap sumber daya manusia masyarakat miskin. Di Afrika, misalnya, terdapat bukti bahwa anak-anak dari keluarga miskin putus sekolah saat krisis. Demikian pula, penelitian di negara-negara Amerika Latin menunjukkan bahwa guncangan nilai tukar perdagangan yang merugikan merupakan salah satu penyebab menurunnya pencapaian pendidikan (lihat, misalnya, Behrman, Duryea, dan Szeleky, 1999).

Untuk mengatasi ketidakstabilan makroekonomi yang berdampak pada masyarakat miskin, adapun langkah – langkah yang dapat diambil:

1. Perlindungan Sosial

Penguatan program perlindungan social untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin selama masa ketidakstabilan ekonomi.

2. Fleksibilitas Kebijakan Moneter dan Fiskal

Kebijakan yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ekonomi untuk memitigasi dampak negatif pada masyarakat miskin.

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin

Program pelatihan dan bantuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat miskin agar dapat bersaing dalam pasar kerja.

4. Kredit Mikro dan Pembiayaan Inklusif

Mendorong akses masyarakat miskin terhadap kredit mikro dan pembiayaan inklusif untuk mendukung usaha kecil dan menengah.

5. Intervensi Pangan dan Kesehatan

Program bantuan pangan dan layanan kesehatan yang terfokus pada masyarakat miskin untuk mengatasi kekurangan pangan dan akses kesehatan.

6. Diversifikasi Ekonomi Lokal

Mendorong diversifikasi ekonomi di tingkat local untuk mengurangi ketergantungan pada sector tertentu yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi.

7. Keterlibatan Komunitas

Melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan benar-benar memenuhi kebutuhan mereka.

#### 8. Pemantauan dan Evaluasi

Menerapkan system pemantauan dan evaluasi untuk secara terus – menerus mengevaluasi dampak kebijakan pada masyarakat miskin dan menyesuaikan kebijakan jikadiperlukan.

Dengan pendekatan holistik yang menggabungkan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan intervensi sector tertentu, masyarakat miskin dapat lebih baik dilibatkan dan dilindungi selama periode ketidakstabilan makro ekonomi.

### **C. STABILITAS MAKRO EKONOMI PENTING TERHADAP PERTUMBUHAN**

Stabilitas makroekonomi merupakan landasan keberhasilan upaya meningkatkan pembangunan sektor swasta dan pertumbuhan ekonom. Regresi lintas negara yang menggunakan sampel negara dalam jumlah besar menunjukkan bahwa pertumbuhan, investasi, dan produktivitas berkorelasi positif dengan stabilitas makroekonomi (Easterly dan Kraay, 1999). Meskipun sulit untuk membuktikan arah penyebabnya, hasil-hasil ini menegaskan bahwa *ketidakstabilan makroekonomi secara umum dikaitkan dengan kinerja pertumbuhan yang buruk*. Tanpa stabilitas makroekonomi, investor dalam dan luar negeri akan menjauh dan sumber daya akan dialihkan ke tempat lain. Faktanya, bukti ekonometrik mengenai perilaku investasi menunjukkan bahwa selain faktor-faktor konvensional (yaitu, pertumbuhan aktivitas ekonomi di masa lalu, tingkat suku bunga riil, dan kredit sektor swasta), investasi swasta secara signifikan dan negatif dipengaruhi oleh ketidakpastian dan ketidakstabilan makroekonomi (lihat, untuk misalnya, Ramey dan Ramey, 1995).

Untuk menjaga stabilitas makro ekonomi untuk mendukung pertumbuhan, adapun beberapa langkah – langkah :

#### 1. Kebijakan Moneter

Pengelolaan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, serta Intervensi mata uang untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

#### 2. Kebijakan Fiskal

Pengelolaan anggaran dengan bijak untuk menghindari defisit yang berlebihan serta pengeluaran yang terarah untuk infrastruktur dan proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan.

3. **Regulasi dan Pengawasan**

Regulasi yang efektif untuk mencegah risiko keuangan dan ketidakstabilan pasar serta pengawasan yang ketat terhadap lembaga keuangan dan sector bisnis.

4. **Pendidikan dan Pelatihan**

Investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

5. **Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

6. **Kebijakan Perdagangan**

Kebijakan perdagangan yang mendukung akses pasar global.

7. **Perlindungan Sosial**

Program perlindungan social untuk mengurangi dampak ketidaksetaraan dan kemiskinan.

8. **Ketahanan Ekonomi**

Membangun ketahanan ekonomi melalui diversifikasi sektor dan keberlanjutan lingkungan.

Kombinasi dari kebijakan-kebijakan ini dapat membantu menciptakan lingkungan makroekonomi yang stabil dan mendukung pertumbuhan jangka panjang.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Kebijakan – kebijakan pada tingkat makro ekonomi untuk mengatasi kemiskinan adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan perekonomian secara keseluruhan, seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan perdagangan. Kebijakan – kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabil, dan inklusif. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan masyarakat. Salah satu, kebijakan makroekonomi yang dapat digunakan untuk menanggulangi kemiskinan yaitu dengan mengurangi tarif pajak untuk meningkatkan insentif produksi dan investasi, serta memberikan keringanan pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk menyelaraskan kebijakan makroekonomi dengan kebijakan sektoral dan mikroekonomi, sehingga dapat menciptakan sinergi dan efektivitas

dalam menangani masalah kemiskinan. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap dampak dan efektivitas kebijakan makroekonomi terhadap penurunan kemiskinan, serta melakukan penyesuaian dan perbaikan jika diperlukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ala Bayo, 1981, Kemiskinan dan Strategi memerangi kemiskinan di daerah, Pustaka Liberty, Yogyakarta.

Ames, B., Brown, W., Devarajan, S., & Izquierdo, A. (2001). *Kebijakan Makroekonomi dan Pengentasan Kemiskinan*. Washington, DC: Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.

Dumairy, 1996, Erlangga, Jakarta Perekonomian Indonesia.

Faisal Basri, 2002, Perekonomian Indonesia, Erlangga, Jakarta.

Sudarwati, D. (2009). *Kebijakan Pengentasan Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan*. Malang: Intimedia.